Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif
Vol. 02, No.1, Januari-Juni 2024
P-ISSN 3025-4108 E-ISSN 3025-4329

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Faisal Affandi[1], Melda Diana Nasution[2]
[1]Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal, [2]Pendidikan Agama Islam, STAIN Mandailing Natal
faisalaffandise@gmail.com, meldadiana83@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai moderasi beragama dapat diimplementasikan secara konkret dalam pemberdayaan ekonomi umat. Metode yang digunakan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah penelitian kepustakaan atau library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi nilai-nilai ini dalam pemberdayaan ekonomi umat dalam konteks Islam memerlukan kerjasama yang erat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Kerjasama ini penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan etika Islam ke dalam kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia tentunya akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Melalui pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama, Indonesia tidak hanya membangun fondasi ekonomi yang kuat, tetapi juga mendorong inklusi sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Ini menjadi langkah penting dalam memajukan kesejahteraan umat dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: *Implementasi, Moderasi Beragama, Pemberdayaan Ekonomi.*

Abstract

This research aims to analyze how the values of religious moderation can be concretely implemented in empowering the economic community. The method used to analyze the implementation of these values in economic empowerment is literature research or library research. The results indicate that implementing these values in economic empowerment within the Islamic context requires close cooperation from various stakeholders, including the government, private sector, civil society, and individuals. This collaboration is crucial to integrate Islamic moral and ethical principles into sustainable and inclusive economic policies. Implementing religious moderation values in the economic empowerment of the community in Indonesia will undoubtedly face complex challenges and opportunities. Through the implementation of these values, Indonesia not only builds a strong economic foundation but also promotes broader and sustainable social inclusion. This is a crucial step in advancing the welfare of the community and creating a better future for future generations.

Keywords: Implementation, Religious Moderation, Economic Empowerment.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi saat ini, nilai-nilai moderasi beragama memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi umat. Konsep moderasi beragama tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga etika, sosial, dan ekonomi yang membentuk landasan bagi praktik ekonomi yang beretika dan bertanggung jawab. Dalam banyak masyarakat, nilai-nilai moderasi beragama menjadi fondasi untuk mengembangkan ekonomi yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga menghormati nilai-nilai sosial dan spiritual yang diyakini oleh komunitas tersebut. Hal ini mencerminkan transformasi nilai-nilai keagamaan menjadi aksi nyata yang membentuk struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Nilai-nilai moderasi dalam konteks agama, khususnya Islam, mencakup pendekatan yang seimbang antara spiritualitas dan kehidupan material. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti toleransi, keadilan, dan keberlanjutan yang dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi. Moderasi dalam konteks beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama (Kemenag RI, 2019).

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim melalui pengembangan keterampilan, akses ke pasar dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang inklusif. Muhammad Akram Khan (1998) menggambarkan bahwa, pemberdayaan ekonomi umat sebagai upaya untuk memberikan akses, kontrol, dan kesempatan kepada umat Islam untuk mengelola sumber daya ekonomi mereka sendiri, dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan partisipasi aktif.

Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam memunculkan tantangan dan peluang yang kompleks dan penting dalam konteks global saat ini. Salah satu tantangan utama adalah mencapai

kesepakatan tentang interpretasi nilai-nilai moderasi beragama di antara berbagai kelompok dan mazhab dalam Islam. Perspektif yang berbeda dapat menyulitkan upaya bersama untuk menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Konteks sosial dan politik yang berbeda di berbagai negara dapat mempengaruhi kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama secara efektif. Faktor-faktor seperti konflik, ketegangan etnik, atau situasi politik yang tidak stabil dapat menjadi hambatan.

Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi memiliki relevansi yang besar dalam konteks global saat ini, baik untuk umat Islam maupun untuk masyarakat luas. Mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi bukan hanya tentang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan harmonis. Ini melibatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung nilai-nilai ini dalam praktik sehari-hari.

Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah upaya yang esensial dalam membentuk sebuah masyarakat yang lebih beradab dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti tenggang rasa, keadilan, dan kesederhanaan tidak hanya mencerminkan aspek spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki dampak yang nyata dalam dinamika ekonomi yang semakin kompleks saat ini. Berdasarkan pemaparan di atas, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dapat diimplementasikan secara konkret dalam pemberdayaan ekonomi umat.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah pendekatan dalam menjalankan keyakinan keagamaan yang menekankan pada sikap tengah, keseimbangan, dan pemahaman yang kontekstual terhadap ajaran agama. Ini melibatkan praktik-praktik keagamaan yang tidak ekstrem atau fundamentalis, serta mendorong toleransi, pemahaman antar kelompok, dan kesadaran akan nilai-nilai universal seperti persaudaraan dan keadilan sosial. Konsep ini penting dalam konteks membangun masyarakat yang harmonis dan menghormati keberagaman keyakinan serta pandangan.

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan atau keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Secara umum, moderasi mencakup penguasaan diri dari sikap yang berlebihan maupun sikap yang kurang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi memiliki dua makna utama, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran dari perilaku yang ekstrem. Kata moderat mengacu pada sikap yang selalu menghindari perilaku ekstrem dan cenderung menuju pada jalan tengah. Orang yang moderat adalah seseorang yang menunjukkan sikap yang wajar dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata "moderation" sering digunakan untuk merujuk pada rata-rata, inti, standar atau sikap yang tidak berpihak. Secara umum, moderat mengutamakan keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan perilaku, baik dalam interaksi dengan individu lain maupun dalam hubungannya dengan institusi negara (Kemenag RI, 2019).

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki arti yang serupa dengan tawassuth (tengah-tengah), i'tidal (adil), dan tawazun (seimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah disebut wasith. Dalam bahasa Arab, wasathiyah juga diartikan sebagai "pilihan terbaik". Baik kata wasath maupun wasathiyah, keduanya mengandung makna yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini

mencakup memilih posisi tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata wasith bahkan telah terserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit', yang memiliki beberapa makna seperti penengah, pelerai dalam perselisihan, dan pemimpin dalam pertandingan (Kemenag RI, 2019).

Azra (2020) menjelaskan bahwa, wasathiyyah adalah konsep penting dalam Islam yang sayangnya sering terlupakan oleh banyak umat. Padahal, ajaran Islam tentang wasathiyyah memiliki implikasi luas dalam berbagai aspek yang menjadi fokus dalam agama Islam. Konsep moderasi ini tidak hanya diajarkan oleh Islam tetapi juga oleh agama-agama lain. Moderasi atau wasathiyyah dapat diartikan sebagai sikap yang lembut dan tidak ekstrem, sehingga memungkinkan untuk memilih jalan tengah sebagai pilihan terbaik. Shihab (2020) menjelaskan bahwa, wasathiyyah merupakan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Prinsip ini selalu memerlukan usaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi, berdasarkan pada petunjuk agama dan kondisi objektif yang tengah dialami.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, moderasi beragama merupakan pendekatan dalam menjalankan keyakinan keagamaan yang menekankan pada keseimbangan, sikap tengah, dan pemahaman yang kontekstual terhadap ajaran agama. Moderasi beragama melibatkan praktik-praktik keagamaan yang tidak ekstrem atau fundamentalis, serta mendorong toleransi, pemahaman antar kelompok, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Ini merupakan konsep yang penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan menghargai pluralitas serta nilai-nilai universal seperti persaudaraan dan keadilan sosial.

2. Nilai-nilai Moderasi Beragama

Nilai dapat dipahami sebagai prinsip atau kepercayaan yang dianggap penting atau berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara

umum. Nilai-nilai ini membentuk dasar dalam mengambil keputusan, menentukan perilaku, serta mengarahkan interaksi sosial dan budaya. Secara umum, nilai-nilai dapat mencakup moralitas, etika, keadilan, toleransi, kejujuran, tanggung jawab, dan berbagai prinsip lain yang dianggap esensial dalam membangun tata nilai dan norma dalam suatu komunitas.

Nilai-nilai moderasi beragama mengacu pada pendekatan dalam praktik keagamaan yang menekankan pada pemahaman yang seimbang, toleransi, dan pemeliharaan harmoni antara beragam keyakinan dan praktik keagamaan. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), nilai-nilai moderasi beragama mencakup prinsip-prinsip berikut:

a. Toleransi: Menghormati dan menghargai keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan tanpa memaksakan pandangan atau merendahkan keyakinan orang lain.
b. Keadilan: Memperlakukan semua individu dengan adil dan merata, tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang lainnya.
c. Keselarasan: Menciptakan keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.
d. Keterbukaan: Menerima dan menghargai perbedaan serta bersedia untuk saling belajar dari berbagai tradisi keagamaan.
e. Keseimbangan: Menjaga keseimbangan antara aspek spiritualitas dengan kebutuhan hidup sehari-hari di tengah masyarakat yang beragam.
f. Pencegahan Konflik: Mendorong upaya-upaya untuk mencegah konflik keagamaan dan mempromosikan perdamaian.
g. Keteladanan: Menunjukkan contoh positif dalam praktik keagamaan sehari-hari, termasuk dalam berinteraksi dengan masyarakat luas.

Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam upaya Kemenag RI untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, dimana setiap individu dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa mengganggu kehidupan beragama yang lain.

Moderasi beragama dalam konteks global mengacu pada pendekatan dalam menjalankan praktik keagamaan yang menekankan pada nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dialog antarkeyakinan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Seyyed Hossein Nasr (1987), seorang cendekiawan Islam terkenal, memiliki pandangan yang mendalam tentang moderasi beragama, yang sering kali dikaitkan dengan konsepnya tentang "wisdom of moderation" (kebijaksanaan moderasi). Pandangan Nasr mencerminkan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional agama dalam konteks modern yang kompleks, serta menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana moderasi beragama dapat berkontribusi dalam membangun keharmonisan dan keadilan di masyarakat global saat ini.

3. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Empowerment atau pemberdayaan adalah konsep yang muncul sebagai bagian dari evolusi pemikiran dan budaya masyarakat Barat, khususnya Eropa. Konsep ini mulai muncul pada tahun 1970-an dan terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme, dan kemudian terkait dengan aliran Neo-Marxisme, Freudianisme, Strukturalisme, serta Sosiologi kritis dari Sekolah Frankfurt.

Adams (2003) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah sarana untuk mendukung individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu mengelola lingkungan mereka dan mencapai tujuan, sehingga mereka dapat bekerja secara mandiri dan bersama-sama membantu diri sendiri dan orang lain dalam meningkatkan kualitas hidup.

Umer Chapra (1993) dalam pemikirannya tentang pemberdayaan ekonomi dalam konteks Islam menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi dalam Islam berarti menciptakan keseimbangan

antara kepentingan ekonomi dan sosial. Hal ini melibatkan pengembangan sistem ekonomi yang mempromosikan kesejahteraan umum, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang mementingkan keuntungan semata.

Pemberdayaan ekonomi umat dalam konteks ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai proses memberikan kekuatan, kontrol, dan kesempatan kepada individu atau komunitas Muslim untuk mengelola sumber daya ekonomi mereka sendiri secara efektif dan berkelanjutan. Umer Chapra (1993) memaparkan beberapa poin utama dalam pemberdayaan ekonomi umat, yaitu:

a. Keadilan Ekonomi: Menurut Chapra, penting untuk memprioritaskan keadilan sosial dan distribusi yang merata terhadap kekayaan dan sumber daya ekonomi. Ini mencakup memastikan bahwa hasil dari aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil individu atau kelompok, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi keseluruhan masyarakat.
b. Keseimbangan dan Kesejahteraan: Menurut Chapra, pemberdayaan ekonomi dalam Islam berarti menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Hal ini melibatkan pengembangan sistem ekonomi yang mempromosikan kesejahteraan umum, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang mementingkan keuntungan semata.
c. Pengentasan Kemiskinan: Chapra menggarisbawahi pentingnya mikrofinansial dan pendekatan ekonomi partisipatif lainnya dalam mengentaskan kemiskinan. Pendekatan seperti ini tidak hanya memberikan akses terhadap sumber daya keuangan, tetapi juga memberdayakan individu dan kelompok masyarakat untuk mengelola dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka sendiri.
d. Kerangka Hukum dan Etika: Bagi Chapra, pemberdayaan ekonomi dalam Islam juga melibatkan penerapan kerangka hukum dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini mencakup perlindungan hak-hak ekonomi

individu dan kelompok, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Dalam keseluruhan, pandangan Chapra tentang pemberdayaan ekonomi dalam Islam menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam praktik ekonomi, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

C. METODE

Metode yang digunakan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan atau library research, menurut Moleong (2014) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan pustaka atau sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh para ahli atau peneliti lain dalam bidang yang sama atau terkait.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Moderasi Beragama Dalam Perspektif Islam

Islam pada dasarnya adalah agama yang bersifat universal, tercermin dalam bentuk-bentuk ketenangan yang memerintahkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan Allah, dan manusia dengan alam. Agama Islam telah menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini telah dicontohkan dan dijadikan teladan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memimpin (Syaifuddin, 2007).

Moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan istilah Islam Wasathiyah, yang berarti Islam sebagai penengah atau Islam yang berada di tengah. Berdasarkan berbagai informasi dalam Al-Qur'an, dasar dari konsep Islam Wasathiyah terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 143;

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ .....

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. .....

Islam Wasathiyah adalah sebuah konsep kebahagiaan yang bersifat moderat, inklusif, dan toleran; yang juga dikenal sebagai Islam yang adil dan seimbang. Dalam istilah Al-Qur'an, Islam Wasathiyah didasarkan pada konsep "umat yang pertengahan" (Al-Baqarah 2:143), yang menggambarkan umat yang tidak ekstrem, baik ke kiri, atas, maupun bawah. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, posisi wasathiyah adalah yang terbaik (khayr al-umur awsatuha). Penerapan Islam Wasathiyah di Indonesia tidak hanya berada pada tingkat doktrin, tetapi juga mencakup kenyataan empiris historis, sosiologis, dan budaya. Saat ini, Islam Wasathiyah di Indonesia menghadapi tantangan dari Islam transnasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi dan penguatan kembali prinsip-prinsip Islam Wasathiyah di Indonesia (Azra, 2020).

Terdapat tiga prinsip penting yang perlu diterapkan dalam menjalani kehidupan Islam Wasathiyah, karena dengan menerapkan ketiga prinsip inilah hubungan antar umat dapat terjalin dengan baik. Prinsip-prinsip ini disebut dengan istilah ukhuwah, yang sering diartikan sebagai hubungan persaudaraan antara satu orang dengan orang lainnya.

Pertama, Ukhuwah Islamiyah bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat dan kokoh antara sesama umat Islam. Dasar dari hubungan yang

kuat ini adalah ikatan akidah yang dijadikan landasan utama dalam menciptakan hubungan yang ideal di masyarakat. Hubungan ini senantiasa mengikat umat Islam satu sama lain, meskipun mereka mungkin berbeda dalam hal bahasa, ras, dan suku (Hasan, 2003).

Kedua, Ukhuwah insaniyah mengacu pada hubungan yang mencakup spektrum yang sangat luas. Dalam konteks ini, Allah melarang manusia untuk saling mengejek, karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Lebih lagi, Allah sangat melarang memanggil orang lain dengan sebutan atau gelar yang mereka tidak sukai, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 (Hamka, 1983).

Ketiga, Ukhuwah wataniyah mengacu pada hubungan yang erat dengan tanah air atau bersifat nasionalisme. Di negara kita, Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, kita semua adalah saudara karena kita tinggal di wilayah yang sama. Inilah yang dimaksud dengan ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan yang tidak memandang perbedaan ras, suku, agama, dan bahasa (Ritaudin, 2017).

2. Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Moderasi beragama tidak hanya berlaku untuk satu agama tertentu, tetapi untuk semua agama, karena setiap agama memiliki potensi untuk munculnya kelompok ekstremis yang perlu diwaspadai. Moderasi beragama bukanlah upaya untuk mencampuradukkan ajaran agama atau mendorong sikap acuh tak acuh terhadap keyakinan agama, melainkan menghargai keragaman agama dan interpretasi ajaran-ajaran agama, serta menghindari ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan. Moderasi beragama juga bukan tentang memoderasi agama itu sendiri, melainkan tentang pemahaman dan praktik beragama oleh umat. Moderasi beragama tidak bertujuan menjauhkan umat dari ajaran agama, melainkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai esensial agama. Agama tetap menjadi landasan spiritual, moral,

dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Moderasi beragama bukanlah antitesis dari radikalisme, tetapi penghargaan terhadap multikulturalisme.

Dalam moderasi beragama, terdapat lima prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap pemeluk agama, yaitu martabat kemanusiaan, kemaslahatan umat (bonum commune), keadilan, keseimbangan, dan ketaatan pada konstitusi. Selain kelima prinsip tersebut, ada juga empat indikator utama dari Moderasi Beragama, yakni komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan penghargaan terhadap tradisi. Kelima prinsip dan empat indikator ini dikenal sebagai sembilan kata kunci dalam memahami konsep Moderasi Beragama yang mengandung nilai-nilai universal. Dalam setiap sosialisasi dan pelatihan, konsep ini selalu diajarkan. Oleh karena itu, setiap peserta, yang biasanya merupakan perwakilan dari berbagai agama, didorong untuk menemukan dalam ajaran agamanya sendiri dasar dan sumber yang dapat memperkuat pemahaman mereka tentang Moderasi Beragama (Kemenag RI, 2019).

Nilai-nilai moderasi beragama merupakan prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, kasta, pekerjaan, atau jenis kelamin. Moderasi beragama mencakup sikap, perspektif dan praktik keagamaan yang menekankan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan, sejalan dengan konsep Pancasila. Sembilan kata kunci dalam memahami konsep Moderasi Beragama yaitu martabat kemanusiaan, kemaslahatan umat (bonum commune), keadilan, keseimbangan, ketaatan pada konstitusi, komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan dan penghargaan terhadap tradisi menjadi nilai-nilai dasar moderasi beragama.

Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara memberikan dorongan, motivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi ekonomi yang mereka miliki, serta

berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut. Keberdayaan masyarakat adalah faktor penting yang memungkinkan komunitas untuk bertahan. Dalam konteks yang lebih dinamis, ini berarti mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi dasar dari konsep yang disebut Ketahanan Nasional.

Pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya merupakan upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar mereka dapat secara mandiri meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam aspek ekonomi. Ekonomi umat dalam konteks ini juga merujuk pada ekonomi rakyat, karena pada dasarnya keduanya memiliki makna yang sama. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Pada dasarnya, ekonomi kerakyatan adalah bentuk dari demokrasi ekonomi. Di Indonesia, demokrasi ekonomi dikembangkan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila (Istan, 2017).

Implementasi secara umum mengacu pada proses atau langkah-langkah konkret untuk menerapkan atau menjalankan suatu rencana, kebijakan, atau ide dalam praktik atau kehidupan nyata. Ini mencakup semua tindakan yang diperlukan untuk mengubah konsep atau rencana menjadi kenyataan yang dapat dijalankan, termasuk perencanaan detail, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan tugas-tugas spesifik, pengawasan dan evaluasi, serta penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi melibatkan koordinasi berbagai aspek seperti teknis, administratif, dan sosial untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan melalui berbagai strategi dan pendekatan, antara lain:

a. Martabat Kemanusiaan
   - Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan kesadaran akan hak-hak asasi manusia dan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.
   - Inklusi Sosial: Menciptakan lingkungan yang inklusif dimana setiap individu dihargai dan diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi.
   - Perlindungan Sosial: Memberikan jaminan sosial dan layanan kesehatan untuk menjaga kesejahteraan semua warga, terutama yang rentan.

b. Kemaslahatan Umat (Bonum Commune)
   - Pengembangan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial untuk kemaslahatan bersama, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
   - Kebijakan Publik yang Adil: Mengimplementasikan kebijakan yang memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.
   - Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.

c. Keadilan
   - Distribusi Kekayaan yang Merata: Menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan melalui pajak progresif dan subsidi untuk masyarakat miskin.
   - Akses ke Keadilan: Memberikan akses yang adil terhadap sistem hukum dan keadilan untuk semua lapisan masyarakat.
   - Pemberdayaan Hukum: Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka.

d. Keseimbangan
   - Ekonomi Berkelanjutan: Menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan yang memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial.

- Keseimbangan Kerja-Kehidupan: Memfasilitasi keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja.
- Kesetaraan Peluang: Memberikan peluang yang setara bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi, termasuk perempuan dan kelompok minoritas.

e. Ketaatan pada Konstitusi

- Pendidikan Hukum dan Konstitusi: Mengedukasi masyarakat tentang konstitusi dan pentingnya mematuhi hukum yang berlaku.
- Penegakan Hukum yang Adil: Memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya sesuai konstitusi.

f. Komitmen terhadap Kebangsaan

- Pendidikan Kebangsaan: Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum pendidikan untuk memperkuat identitas nasional.
- Partisipasi dalam Pembangunan Nasional: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan nasional.
- Solidaritas Nasional: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya solidaritas nasional dan gotong royong.

g. Toleransi

- Dialog Antar Budaya dan Agama: Mendorong dialog yang terbuka dan saling menghormati antara berbagai budaya dan agama.
- Edukasi tentang Keberagaman: Mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan sejak dini.
- Pengembangan Kebijakan Inklusif: Mengembangkan kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan menghargai keberagaman.

h. Penolakan terhadap Kekerasan

- Pendidikan tentang Damai: Mengintegrasikan pendidikan tentang perdamaian dan resolusi konflik dalam sistem pendidikan.
- Penegakan Hukum terhadap Kekerasan: Mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap semua bentuk kekerasan.
- Pengembangan Program Pencegahan Kekerasan: Mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mencegah kekerasan dalam masyarakat.

i. Penghargaan terhadap Tradisi

- Pelestarian Budaya Lokal: Mendukung upaya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dan tradisi lokal.
- Integrasi Nilai Tradisional dalam Ekonomi: Mempromosikan produk dan praktik ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai tradisional.
- Pendidikan tentang Warisan Budaya: Mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga dan menghargai warisan budaya.

Implementasi nilai-nilai ini dalam pemberdayaan ekonomi umat dalam konteks Islam memerlukan kerjasama yang erat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Kerjasama ini penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan etika Islam ke dalam kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung kesejahteraan umat dengan mempromosikan keadilan distributif, melalui kebijakan fiskal dan sosial yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi dengan mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial, memastikan bahwa kegiatan ekonomi mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Masyarakat sipil memiliki peran dalam mengawasi implementasi kebijakan

dan memastikan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat dipegang teguh dalam setiap langkah pembangunan ekonomi. Mereka dapat melakukan advokasi untuk kepentingan masyarakat luas dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau didiskriminasi dalam proses ekonomi.

Individu sebagai bagian dari masyarakat juga memegang peran penting dalam menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik sebagai konsumen yang cerdas dan bertanggung jawab, maupun sebagai anggota masyarakat yang aktif dalam mendukung prakarsa dan program-program yang memajukan kesejahteraan bersama. Strategi implementasi harus disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga memberikan dampak yang nyata dan positif bagi kehidupan ekonomi umat secara keseluruhan. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

3. Tantangan Dan Peluang Pengimplementasian Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi yang kini telah banyak diterima di kalangan masyarakat kecil, terutama di Indonesia. Bahkan, konsep ini telah berkembang melalui berbagai konsep dan lembaga yang menaunginya. Salah satu contoh penerapan pemberdayaan ini adalah banyak diterapkan di lembaga keuangan mikro Islam. Bukti dari hal ini adalah semakin berkembangnya lembaga BMT (Baitul Mal Wat-Tamwil) dari tahun ke tahun. Walaupun pada kenyataannya strategi ini belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal dalam kehidupan masyarakat, hal ini terjadi karena masyarakat masih cenderung percaya pada sistem kapitalis yang telah lama mereka kenal. Selain itu, banyak pemikir dan praktisi masih belum

memahami dan meyakini bahwa pendekatan partisipatif atau pemberdayaan dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah pembangunan yang dihadapi.

Melalui pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama, Indonesia memiliki potensi besar untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan. Moderasi beragama disini merujuk pada pendekatan yang menghargai keragaman agama dan keyakinan, sambil mempromosikan nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Pertama, dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama, masyarakat Indonesia dapat membangun lingkungan ekonomi yang kondusif bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini termasuk menciptakan iklim usaha yang stabil dan mendukung, di mana setiap individu merasa aman dan dihormati, tanpa terkecuali atas dasar agama atau kepercayaan mereka.

Kedua, pendekatan ini mendorong kolaborasi yang lebih baik antara sektor-sektor ekonomi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kebijakan ekonomi, pemerintah dapat menciptakan kerangka kerja yang adil dan inklusif, mengarah pada distribusi yang lebih merata dari peluang ekonomi dan kemakmuran.

Ketiga, nilai-nilai moderasi beragama juga dapat memperkuat integrasi sosial dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendekatan ini mempromosikan dialog antaragama yang harmonis dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, melalui pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama, Indonesia tidak hanya membangun fondasi ekonomi yang kuat, tetapi juga mendorong inklusi sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Ini

menjadi langkah penting dalam memajukan kesejahteraan umat dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia tentunya akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Tantangan merujuk pada situasi atau kondisi yang menghalangi pencapaian tujuan atau kemajuan dalam suatu konteks tertentu. Tantangan dapat berupa hambatan, masalah, atau rintangan yang kompleks dan memerlukan solusi atau strategi khusus untuk mengatasinya. Tantangan bisa bersifat internal (misalnya, kebijakan yang tidak efektif) atau eksternal (seperti perubahan dalam lingkungan global atau politik). Peluang mengacu pada situasi atau kondisi yang memberikan kemungkinan atau potensi untuk mencapai keberhasilan, perkembangan, atau keuntungan dalam suatu konteks. Peluang sering kali muncul dari situasi di mana ada kebutuhan untuk inovasi, perubahan, atau peningkatan dalam cara berpikir atau bertindak. Peluang dapat berasal dari perkembangan teknologi, perubahan dalam kebijakan pemerintah, atau perubahan dalam preferensi pasar atau masyarakat.

Tantangan pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia:

a. Ketegangan dan Konflik Agama: Indonesia memiliki sejarah yang kompleks dalam hal ketegangan dan konflik antaragama. Tantangan utama adalah mengelola perbedaan keyakinan dan meminimalkan potensi konflik yang dapat menghambat pembangunan ekonomi.
b. Pergeseran Politik dan Ideologis: Perubahan politik dan ideologis dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini dapat menghambat konsistensi dalam kebijakan dan praktik ekonomi yang inklusif.
c. Ekstrimisme dan Radikalisasi: Ancaman ekstrimisme dan radikalisasi dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan, serta menghambat

iklim usaha yang kondusif untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

d. Keterbatasan Akses dan Pendidikan: Beberapa komunitas mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan ekonomi yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam ekonomi formal.

Peluang pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia:

a. Penguatan Keharmonisan Sosial: Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dapat memperkuat keharmonisan sosial dan membangun kerjasama antaragama yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.
b. Peningkatan Kredibilitas dan Kepercayaan: Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam strategi ekonomi dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah dan lembaga keuangan di mata masyarakat dan investor, mengarah pada kepercayaan yang lebih besar dan stabilitas ekonomi.
c. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Nilai-nilai moderasi beragama sering kali mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, seperti menghormati hak asasi manusia dan menjaga lingkungan hidup, yang mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang yang lebih stabil dan berkelanjutan.
d. Inklusi Sosial dan Ekonomi: Implementasi nilai-nilai ini dapat membuka jalan bagi inklusi sosial dan ekonomi yang lebih luas, dengan memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dan kemakmuran.
e. Promosi Pendidikan dan Kesadaran: Mendorong pendidikan dan kesadaran tentang nilai-nilai moderasi beragama dapat membantu

mengatasi ketidaktahuan dan stereotip negatif, mengarah pada masyarakat yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan.

Dengan mengidentifikasi tantangan ini secara jujur dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia dapat memperkuat basis nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat stabilitas sosial dan politik, tetapi juga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara keseluruhan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

E. PENUTUP

Islam pada dasarnya adalah agama yang bersifat universal, tercermin dalam bentuk-bentuk ketenangan yang memerintahkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan Allah, dan manusia dengan alam. Agama Islam telah menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan istilah Islam Wasathiyah, yang berarti Islam sebagai penengah atau Islam yang berada di tengah. Moderasi beragama bukanlah upaya untuk mencampuradukkan ajaran agama atau mendorong sikap acuh tak acuh terhadap keyakinan agama, melainkan menghargai keragaman agama dan interpretasi ajaran-ajaran agama, serta menghindari ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan.

Sembilan kata kunci dalam memahami konsep Moderasi Beragama dijadikan sebagai nilai-nilai moderasi beragama yaitu martabat kemanusiaan, kemaslahatan umat (bonum commune), keadilan, keseimbangan, ketaatan pada konstitusi, komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan dan penghargaan terhadap tradisi menjadi nilai-nilai dasar moderasi beragama. Implementasi nilai-nilai ini dalam pemberdayaan ekonomi umat dalam konteks Islam memerlukan kerjasama yang erat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Kerjasama

ini penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan etika Islam ke dalam kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia tentunya akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Dengan mengidentifikasi tantangan ini secara jujur dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia dapat memperkuat basis nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat stabilitas sosial dan politik, tetapi juga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara keseluruhan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui pengimplementasian nilai-nilai moderasi beragama, Indonesia tidak hanya membangun fondasi ekonomi yang kuat, tetapi juga mendorong inklusi sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Ini menjadi langkah penting dalam memajukan kesejahteraan umat dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

F. DAFTAR PUSTAKA

Adams, Robert., 2003, *Social Work and Empowerment*. 3rd ed., New York: Palgrave Macmillan.

Azra, Azyumardi., 2020, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, hingga Prilaku*, Jakarta: Kencana.

Azra, Azyumardi., 2020, *Relevansi Islam Wasathiyah*, Jakarta: Gramedia.

Chapra, Muhammad Umer., 1993, *Islam and Economic Development*, Pakistan: The International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.

Hamka, 1983, *Tafsir Al-Azhar,* Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hasan, T., 2003, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tatanan Zaman,* Jakarta: Lantabora Press.

Istan, Muhammad., 2017, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Persfektif Islam*, Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 2, No. 1.

Kementerian Agama RI, 2019, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat.

Khan, Mohammad Akram, 1998, *Islamic Economics: An Annotated Bibliography (vol 3)*, International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, Islamabad: IRI Press.

Moleong, Lexy J., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasr, Seyyed Hossein., 1987, *Traditional Islam in The Modern Word*, London: Worts-Power Associates.

Ritaudin, Muhammad Sidi., 2017, *Promosi Islam Moderat Menurut Ketum (MUI) Lampung dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung*, Jurnal TAPIs: Vol. 13, No. 02.

Shihab, M. Quraish., 2020, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, Tanggerang: Lentera Hati.

Syaifuddin, 2007, *Negara Islam Menurut Konsep Ilmu Khaldun*, Yogyakarta: Gama Media.